



Buletin Parlementaria

Nomor 1174/I/XI/2021 • November 2021



DPR Apresiasi Pengembangan Teknologi PT LEN



3 Puan Maharani:
Harga Tes PCR
Jangan Lebih Mahal
dari Harga Tiket



4 Gus Muhaimin:
Santri Harus Jadi
Penopang Kekuatan
Ekonomi Baru



9 772614 339005



BULETIN

DPR Apresiasi Pengembangan Teknologi PT LEN



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat meninjau PT LEN Industri di Bandung. Foto: Runi/nvl

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi PT LEN Industri (Persero) yang sangat luar biasa dan baik dalam mengembangkan teknologi industri pertahanan. Tak hanya itu, PT LEN Industri memiliki potensi untuk memenuhi semua kebutuhan pertahanan Indonesia.

“Setelah saya melihat dan meninjau secara langsung, teknologi industri pertahanan di Indonesia tidak kalah canggih dengan negara lain, jika melihat dari desain dan teknologi. Untuk itu, PT LEN Industri harus terus mengembangkan keahliannya di bidang industri pertahanan,” kata Dasco usai meninjau PT LEN Industri di Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/10). Turut mendampingi, Dirut PT LEN Industri Bobby Rasyidin.

Dalam kesempatan itu, Dasco sempat melihat lokasi pembuatan dan

”

TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN DI INDONESIA TIDAK KALAH CANGGIH DENGAN NEGARA LAIN, JIKA MELIHAT DARI DESAIN DAN TEKNOLOGI.

perakitan teknologi, mulai dari mesin kereta, mesin pesawat, kendaraan motor listrik serta produksi elektronik lainnya. Ia mendapati informasi bahwa PT LEN Industri memiliki teknologi sistem persinyalan kereta api yang masuk lima besar di dunia dan digunakan oleh negara lain, seperti MRT Singapura serta Bangladesh yang sudah dipakai sejak tahun 2015.

“Oleh karena itu saya mengimbau kepada pihak-pihak yang berada di

dalam negeri, (untuk) bisa memajukan produksi dalam negeri yakni buatan anak bangsa kita sendiri. Sebagaimana kita dukung keinginan presiden untuk memajukan produksi dalam negeri. Pasalnya kita tidak kalah dari negeri lain, baik dari sisi desain maupun dari sisi teknologi,” optimis politisi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama PT LEN Industri Bobby Rasidin berterima kasih atas kunjungan Pimpinan DPR RI ke PT LEN Industri. “Kami akan berusaha meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi maupun desain sebagai salah satu tantangan di masa depan. Agar kami bisa lebih maju dan lebih baik dalam meningkatkan kualitas. Saya berharap kami bisa mewujudkan cita-cita nasional, bisa menjadi bangsa yang mandiri dalam hal teknologi ataupun industri. Diharapkan ke depannya para pengguna teknologi domestik tidak lagi memesan (produk) ke luar negeri, akan tetapi membeli produk dalam negeri,” harapnya. ■ rni/sf

Puan Maharani: Harga Tes PCR Jangan Lebih Mahal dari Harga Tiket



Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani. Foto: Kresno/mvl

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu dengan masa berlaku 3x24 jam, agar bisa menjadi syarat perjalanan untuk semua moda transportasi. Namun Puan mengingatkan, hal tersebut masih akan membebani rakyat mengingat harga tiket transportasi massal banyak yang lebih murah dari harga tes PCR.

“Contohnya masih ada tiket kereta api yang harganya di kisaran Rp75 ribu untuk satu kali perjalanan. Begitu pula dengan tiket bus AKAP dan kapal laut. Saya kira kurang tepat bila kemudian warga masyarakat pengguna transportasi publik harus membayar lebih dari 3 kali lipat harga tiket untuk tes PCR,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada *Parlementaria*, Selasa (26/10).

Puan memahami kebijakan tes PCR bagi semua pengguna moda transportasi bertujuan untuk mengantisipasi gelombang baru Covid-19, terutama jelang libur Natal dan Tahun Baru. “Namun hendaknya harga PCR jangan lebih mahal dari tiket transportasi publik yang mayoritas digunakan masyarakat,” kata Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu.

Lebih lanjut Puan menilai, tes PCR sebaiknya tetap difungsikan sebagai alat diagnosa Covid-19. Untuk *skrining*, menurut Puan, tes antigen ditambah optimalisasi aplikasi PeduliLindungi sudah cukup. “Aplikasi PeduliLindungi ini kan dibuat untuk mengetahui status seseorang. Seharusnya ini yang dimaksimalkan, bagaimana pemerintah mampu *men-tracking suspect* Covid-19 agar tidak berkeliaran hingga statusnya kembali hijau,” paparnya. ■ ah/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiaryah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldio Ople, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Muhammad Ali, Mulus Karyadi,

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Bangun Kepercayaan Masyarakat, DPR Akan Terus Lakukan Perbaikan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI, meskipun berbagai usaha terus dilakukan dengan maksimal untuk menekan citra negatif di masyarakat. Ia melanjutkan DPR RI akan terus melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI agar semakin bertambah.

“Kalau ada masukan dari masyarakat, dan kita juga sering mengadvokasi buruh, ojek *online*, korban asuransi bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang sering memberikan kami kritik, kami terima semua kritik itu sebagai masukan yang berguna,” kata Dasco saat Audiensi dengan para Magang Kampus Merdeka di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (25/10).

Politisi Partai Gerindra itu juga mengatakan masyarakat dapat memberikan laporan secara langsung melalui *website* maupun media sosial, untuk kemudian dilakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut.

Diketahui, dalam upaya berperan memperjuangkan aspirasi rakyat, DPR RI berencana membangun tempat khusus untuk masyarakat menyampaikan aspirasi maupun demonstrasi. “Dari dua periode lalu sudah direncanakan untuk membangun panggung demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, kita sudah mengalokasikan tempatnya, sudah siapkan anggarannya, tapi karena

”

MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN LAPORAN SECARA LANGSUNG MELALUI WEBSITE MAUPUN MEDIA SOSIAL, UNTUK KEMUDIAN DILAKUKAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) DENGAN PERWAKILAN MASYARAKAT YANG MENYAMPAIKAN ASPIRASI TERSEBUT

pandemi Covid-19 belum dapat direalisasikan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Dasco berpesan bahwa untuk menjadi seorang pimpinan harus mampu mengakomodir serta berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam mewujudkan program-program yang dirancang untuk membangun kepercayaan masyarakat. “Kalau jadi pimpinan, harus memposisikan diri menjadi anggota semua partai, tidak bisa egois, karena kalau seperti itu semua program tidak akan jalan, saling sandera-menyandera yang kemudian tidak menjadi jalan keluar,” pesan Dasco. ■ *mld/sf*

Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad.
Foto: Oji/nvl





Gus Muhaimin: Santri Harus Jadi Penopang Kekuatan Ekonomi Baru



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri Refleksi Hari Santri Nasional (HSN) 2021. Foto: Oji/nvi

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong agar santri tidak lengah menjadi bagian bangsa Indonesia dalam menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, dan ajaran Islam *rahmatan lil alamin* serta tradisi luhur Bangsa Indonesia.

Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Refleksi Hari Santri Nasional (HSN) 2021, di kediaman Pengasuh Ponpes Al Madina Gunungpati Semarang, Habib Umar Muthahar, Rabu (20/10). Peringatan

Hari Santri sendiri diperingati setiap tanggal 22 Oktober, dimana pada tahun 2021 mengusung tema "Santri Siaga Jiwa dan Raga".

Lebih lanjut, Gus Muhaimin menyampaikan, santri tidak semuanya adalah sosok yang mondok di pesantren dalam waktu tertentu. Label santri disebutnya bisa saja disematkan kepada siapapun selama dia mencintai ulama, kiai, dan mau menjalankan tradisi *ahlissunnah wal jamaah*. "Pokoknya yang cinta ulama, cinta kiai, melaksanakan ajaran Aswaja minimal mauludan, insyaallah bisa kita sebut santri. Apalagi kalau bulan maulid muludannya 10 kali, nah itu lebih santri lagi," ungkap Gus

Muhaimin lebih lanjut.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengajak kaum santri untuk terus tumbuh menjadi generasi membanggakan untuk Indonesia. Tubuh, tenaga dan buah karya para santri, kata dia, diabdikan khusus untuk Indonesia. "Semakin maju santri Indonesia, maka semakin maju bangsa Indonesia. Semakin maju Ahlissunnah Wal Jamaah, maka Insya Allah Indonesia juga akan semakin maju di masa akan datang," ungkap Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin berharap, santri dan pesantren dapat terus dan terus menjadi kekuatan besar bagi negara, sumber inspirasi sekaligus salah satu sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia. Karena itu, Gus Muhaimin berujar, santri perlu menekankan dua hal. Pertama, santri harus menjadi penopang kekuatan ekonomi baru. "Kenapa? Karena sekarang ini semua rontok. Dan peran santri sangat dibutuhkan saat ini," pesan Gus Muhaimin kepada para santri.

Kedua, lanjut Gus Muhaimin, Santri harus melek teknologi. Dia mencontohkan Habib Umar Muthahar dan KH. Yusuf Chudlory yang mampu menjadikan teknologi sebagai media dakwah sehingga mampu menembus banyak kalangan secara lebih luas. "Teknologi ini penting, kenapa? Pola hidup masyarakat telah berubah, cara kerja berubah, hubungan produsen dengan konsumen juga berubah," ucap legislator dapil Jatim VIII itu.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Habib Umar Muthahar, Rois Syuriah PWNU Jateng KH. Ubaidillah Shodaqoh, Ketua PWNU Jawa Tengah KH. Muzammil, serta sejumlah Kiai dan Habib di wilayah Semarang.

Hadir juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Syamsurijal, serta Pengasuh Ponpes API Tegalrejo Jateng KH. Yusuf Chudlory beserta jajarannya. ■ skri/sf

Komisi I Apresiasi Kodam XVII Cenderawasih Jaga Keamanan PON XX Papua

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai Kodam XVII/Cenderawasih telah bekerja secara optimal untuk memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX berjalan dengan baik. Dave juga mengapresiasi seluruh personel TNI yang terus berupaya mencegah adanya ancaman atau gangguan keamanan, serta upaya penyusupan dari kelompok separatis di Papua.

Demikian disampaikan Dave usai menghadiri pertandingan PON pada laga final cabor karate putri di GOR Politeknik Penerbangan Kayu Batu, Jayapura, Senin (11/10). Dirinya menilai

jajaran Kodam XVII/ Cenderawasih telah bekerja dengan optimal memastikan keamanan PON tetap tertangani dengan baik dari segala macam gerakan-gerakannya yang coba diinisiasi atau coba disusupi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Semuanya telah berhasil ditangkis dan kita patut apresiasi luar biasa kepada seluruh personel TNI telah bekerja secara optimal untuk memastikan tidak ada kerusuhan, tidak ada kericuhan ataupun serangan-serangan dari kelompok-kelompok separatis tersebut,” ujarnya.

Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII ini juga

mengapresiasi BIN Daerah Papua yang telah berkoordinasi dengan seluruh instansi dalam menjaga kondusifitas Papua dan menangkal segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menggagalkan penyelenggaraan PON XX Papua.

Dave berharap kondusivitas Papua saat ini juga dapat berlangsung terus ke depannya dalam mendukung kebijakan pembangunan sumber daya alam, manusia hingga infrastruktur dan pelayanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Dari BIN Papua juga telah berkoordinasi dengan baik dengan seluruh instansi untuk menangkal segala macam kegiatan-kegiatan yang dapat menggagalkan atau mengacaukan rencana ataupun pelaksanaan PON ini,” tutur Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyampaikan apresiasi kedatangan Tim Kunjuran Komisi I DPR ke Papua dalam memastikan penjagaan dan keamanan penyelenggaraan PON XX. “Kunjungan Komisi I ke sini untuk mendukung pelaksanaan PON XX di Papua dari segi keamanan, mengingat mitra Komisi I DPR adalah aparat TNI dan BIN,” terang Zainudin Amali. ■ nap/es



Foto bersama Tim Kunjuran Kerja Reses Anggota Komisi I DPR RI dengan Menpora usai menghadiri pertandingan PON pada laga final cabor karate putri. Foto: Nap/mvl

BPN Harus Seimbangkan Kawasan Wisata dan Pertanian di Bali

Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendorong agar Kanwil Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Bali menyeimbangkan kawasan wisata dan pertanian di Bali. Hal ini menyangkut tata ruang Bali agar jangan sampai kawasan pertanian yang sangat produktif justru bergeser fungsinya menjadi kawasan pariwisata.

“Bali dengan salah satu pola tanam pertanian subak, sudah cukup terkenal. Produktivitas pertaniannya pun cukup bagus. Kemudian pariwisata saat ini menjadi sektor yang diandalkan. Namun kita tidak boleh mengorbankan sektor-sektor pertanian yang produktivitasnya tinggi ini,” ucap Amin usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Kanwil BPN Bali, di Denpasar, Senin (11/10).

Ia melanjutkan, pertimbangan teknis terkait tata ruang yang disampaikan BPN Bali jangan sampai bertentangan dengan peraturan daerah (perda) yang dibuat oleh pemda. “BPN sebagai institusi tentu sudah mempertimbangkan secara komprehensif atas hal-hal yang menjadi bagian yang diputuskan oleh pemda,” terang Amin.

Politisi Partai NasDem ini menyarankan agar Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang sudah berjalan di BPN harus terintegrasi dengan OSS yang ada di pemerintah daerah baik itu kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.

“Karena kalau sistem itu terintegrasi, maka deteksi dini terkait dengan pelanggaran, tata ruang dan sebagainya itu sudah bisa dimonitor dengan mudah.



Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman. Foto: Erman/nvl

Ke depan dengan adanya teknologi IT, layanan publik bisa lebih mudah dan meningkat yang pada akhirnya pemda mendapat nilai positif dari masyarakat,” tutur Amin.

Di sisi lain, ia juga meminta agar BPN lebih aktif untuk memediasi sengketa-sengketa agraria supaya tidak berlarut-larut. Dengan mediasi, sengketa akan lebih cepat ditemukan jalan tengahnya

”

BPN SEBAGAI INSTITUSI TENTU SUDAH MEMPERTIMBANGKAN SECARA KOMPREHENSIF ATAS HAL-HAL YANG MENJADI BAGIAN YANG DIPUTUSKAN OLEH PEMDA

ketimbang diselesaikan melalui jalur hukum. “Kalau pakai jalur hukum, ini tentatif, waktunya tidak terbatas. Bagaimanapun juga BPN punya target menyelesaikan sengketa agraria ini menjadi bagian dari program prioritas mereka,” terangnya.

Amin juga mengapresiasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Bali yang secara umum sudah berjalan sangat baik. Namun, terkait adanya tanah yang saling beririsan kepemilikannya, BPN perlu duduk bersama dengan pihak-pihak atau *stakeholder* yang area lahannya bermasalah.

“Tentu Komisi II sangat berharap, BPN lebih proaktif untuk melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada para pihak masyarakat, terutama yang berkaitan dengan lahan yang dengan ada. Karena ini persoalan budaya, kultur yang sudah mengakar,” pungkas Amin. ■ es

Arteria Dahlan Apresiasi Kinerja Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Surabaya

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan memberikan apresiasi kepada Pengadilan Tinggi Surabaya atas kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurutnya, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, pelayanan publik khususnya di bidang penegakan hukum hadir untuk masyarakat.

“Sangat apresiasi di tengah keterbatasan yang dimiliki (Pengadilan Tinggi Surabaya), pelayanan publik di bidang penegakan hukumnya hadir luar biasa untuk rakyat. Kami melihat tidak hanya pelayanan publiknya, tetapi inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik ini betul-betul kental dan berasa tidak hanya di Surabaya, tetapi di Pengadilan Negeri Jawa Timur,” jelas Arteria saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Sidoarjo di Surabaya, Jatim, Selasa (12/10).

Sebelumnya, Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI telah melakukan peninjauan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Surabaya. Sesuai tujuan Kunker Reses ini, Komisi III DPR RI ingin menyerap aspirasi dan melihat kondisi dan fasilitas mitra kerja di daerah, utamanya kondisi dan fasilitas pengadilan negeri secara riil di lapangan.

“Hakimnya bagus-bagus, tapi ruangnya masih kurang, fasilitasnya juga. Istilah ‘Yang Mulia’ ini kan lebih dari ‘Pejabat Negara’. Muliakanlah mereka, jagalah keluhuran, kehormatan,



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Foto: Hanum/nvl

dan martabat mereka,” pinta politisi PDI-Perjuangan tersebut. Oleh karena itu, Arteria pun berharap agar semua aspirasi yang telah disampaikan Pengadilan di Jatim bisa diwujudkan oleh Komisi III DPR RI.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Sidoarjo Moh Muchlis mengharapkan perhatian Komisi III DPR RI untuk memperbaiki kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo. “Kami memohon perhatian untuk membangun. Kalaupun *toh* misalnya tidak sekarang,

setidaknya di renovasi agar kami (PN Sidoarjo) bisa semakin memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat pencari keadilan,” harapnya.

Diketahui, Komisi III DPR RI menyoroti berbagai persoalan dalam rangka perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan. Hal ini tidak lain merupakan upaya untuk mengoptimalkan sistem penegakan hukum dan peradilan yang dapat membantu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ■ hnm/sf



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI saat menebar benih ikan di Danau Toba, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Foto: Arief/nvl

Mindo Sianipar: Jaga Kelestarian, Ikan Lokal Harus Dibudidayakan

Anggota komisi IV DPR RI Mindo Sianipar mengatakan pengembangan budi daya ikan lokal dalam menjaga kelestarian komoditas perikanan harus terus dilakukan, salah satunya yaitu dengan melakukan *restocking* ikan endemik. Hal ini perlu rutin dilakukan, selain untuk menghindari kepunahan, juga

akan meningkatkan pendapatan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Mindo saat mengikuti Tim Kunker Komisi IV DPR RI di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senin (11/10). Didampingi Bupati Karo Cory S Sebayang, Tim Kunker juga menebar 65.000 benih Ikan Nilem dan Tows di perairan Danau Toba.

“*Restocking* ikan endemik lokal ini harus dilakukan untuk pengalihan keramba keramba ikan yang ada. Kami juga sangat mengapresiasi pada masyarakat karena pengalihan keramba tanpa biaya pemerintah daerah, dan ini swadaya sendiri oleh mereka,” ucap politisi PDI-P itu.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI TA. Khalid menerangkan, jaring apung yang berada di danau toba tidak boleh digunakan dan harus dialihkan menjadi bioflok. Hal ini sudah disepakati oleh nelayan setempat.

“Sudah ada kesepakatan dengan para nelayan yang ada di Danau Toba agar tidak lagi memasang jaring. Dengan catatan, mata pencaharian mereka juga tidak boleh terhenti. Jadi tugas negara adalah mengedukasi para nelayan tentang cara memberdayakan ikan dalam bentuk selain jaring,” tandas politisi Partai Gerindra tersebut. ■ **afr/es**

PCR Jadi Syarat Wajib Penerbangan, Koordinasi Lintas Kementerian Dipertanyakan

Menyikapi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyayangkan sekaligus mempertanyakan landasan aturan yang menjadikan tes *polymerase chain reaction* (PCR) wajib sebagai syarat penerbangan bagi penumpang.

“Ini perlu diperjelas landasan aturan ini lahir, kenapa? Apakah Kementerian Dalam Negeri sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Ini hasil Satgas Covid atau bagaimana? Jangan kemudian melahirkan polemik baru,” tanya Novita dalam keterangan pers yang disampaikan kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Senin (25/10).

Sebagai mitra kerja Kementerian Perhubungan, ia mengungkapkan rasa prihatin terkait terpukulnya sektor penerbangan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2020-2021, sektor penerbangan Indonesia mengalami berbagai hantaman di semua lini. Di antaranya pengurangan karyawan maskapai dan petugas bandara hingga UMKM dan jasa perjalanan yang gulung tikar.

Tentu saja, serangkaian kejadian tersebut berimbas pada daerah-daerah yang hidup mengandalkan sektor pariwisata seperti Bali dan Lombok. Di sisi lain, Novita mengapresiasi sektor penerbangan yang tetap berusaha bangkit untuk tetap bertahan di situasi yang pelik ini. Hal tersebut terbukti

dengan semakin membaiknya sektor penerbangan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kemenhub.

“Kita di Komisi V itu mulai senang melihat laporan Kementerian Perhubungan, terutama pada sektor penerbangan. Kementerian harus bisa melihat secara holistik ketika membuat kebijakan, jangan sampai kebijakan yang diambil justru langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi tanah air. Penting komunikasi dan koordinasi antar kementerian itu di sini,” kritik Novita.

Memahami kondisi tersebut, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tersebut meminta Kemendagri untuk segera mengevaluasi instruksi wajib PCR untuk penerbangan tersebut. Evaluasi ini menjadi vital sebagai bahan penilaian apakah PCR perlu diterapkan sebagai syarat penerbangan. Lebih lanjut,

dengan diimplementasikan kebijakan tersebut apakah telah sesuai dengan standar dan fungsi yang telah ditentukan.

“Saya minta evaluasi kembali Inmendagri tersebut. Kebijakan *ke-new normal-an* harus disesuaikan antar sektor. Sekaligus saya minta untuk Tes PCR tersebut disesuaikan dengan fungsinya untuk alat diagnosis Covid-19, untuk screening cukup tes swab antigen saja. Apalagi untuk penerbangan sudah mewajibkan vaksin saat ini. Kita tempatkan sebagaimana mestinya,” urai legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.

Lebih lanjut, Srikandi Partai Gerindra itu ingin setiap elemen pemerintah berupaya dengan memberikan dukungan terutama menunjang kebangkitan sektor penerbangan di tanah air. Dengan hidupnya perekonomian di lingkungan bandara, maka dapat meminimalisir dampak akibat imbas pandemi Covid-19. ■ ts/sf

Anggota Komisi V DPR RI
Novita Wijayanti. Foto: Arief/nvl



Komisi VI Pantau Kesiapan *Holding* BUMN Pariwisata untuk Pembukaan Wisata Bali

Komisi VI DPR RI ingin melihat kesiapan Provinsi Bali yang saat ini menjadi tujuan wisata nasional, bahkan juga dibuka untuk kunjungan wisata dari wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kesiapan *Holding* BUMN Pariwisata tentang kesiapan pembukaan pariwisata di Pulau Dewata, baik kesiapan transportasi, bandara, destinasi wisata, akomodasi/hotel, dan

juga kesiapan infrastruktur lainnya yang hampir dua tahun terakhir ini tidak berjalan karena pandemi Covid-19.

“Kita harapkan, dengan kunjungan kerja Komisi VI DPR ke Provinsi Bali ini, persiapan-persiapan yang dilakukan dalam rangka pembukaan Bali untuk wisata internasional atau masuknya turis mancanegara dapat lebih dipersiapkan, terutama oleh BUMN yang langsung menangani pariwisata,” jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja di Bali, Kamis (21/10).

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPR RI ini menyampaikan harapan agar Bali dapat menjadi daerah percontohan wisata new normal, baik untuk turis dari dalam negeri maupun

luar negeri. “Kita harapkan Bali akan menjadi pemantik untuk kegiatan pariwisata, dan pentingnya peran BUMN Pariwisata untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” tandas Aria.

Selain itu, Aria juga menuturkan masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk pemulihan dampak pandemi di sektor pariwisata, mengingat saat ini Indonesia belum bebas dari pandemi Covid-19. Legislatur dapil Jawa Tengah V itu memaparkan pentingnya menangani dampak ekonomi di sektor pariwisata yang merupakan peran penting dari *Holding* BUMN Pariwisata.

“Untuk sektor pariwisata, kita akan mulai konsentrasikan fungsi pengawasan Komisi VI kepada mitra kerja Komisi VI. Seperti penanganan dampak Covid-19 terhadap Garuda Indonesia yang beberapa waktu lalu banyak mengalami kerugian, dan juga BUMN properti, khususnya perhotelan yang dua tahun ini mengalami kemacetan. Kami akan kasus per kasus untuk pembenahannya. Termasuk juga Sarinah yang dalam konsep *holding* ini akan menjadi *leading* untuk pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” papar Aria.

Aria berharap mitra kerja Komisi VI DPR RI terus mengoptimalkan perannya agar konsisten meningkatkan angka Produk Dometik Bruto (PDB). “Kita akan terus kawal dan mengawasi ini, khususnya di tingkat regulator, baik itu di (Kementerian) BUMN, (Kementerian) Perdagangan, (Kementerian) Investasi, maupun (Kementerian) Perindustrian,” tutup Aria. ■ ica/sf

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Aria Bima.
Foto: lca/nvi



SRG Diharap Mampu Jaga Stabilitas Harga Produk Pertanian

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung berharap dengan adanya Sistem Resi Gudang (SRG) bisa membantu petani menstabilkan harga saat panen raya tiba. Petani, pedagang pengepul, dan pengelola gudang SRG harus bersinergi membangun hubungan yang saling menguntungkan.

“Kehadiran SRG ini diharapkan mampu membantu para petani menjaga kestabilan harga produk pertanian,” ujar Martin saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Bandung, Jabar, Kamis (21/10). Pertemuan tersebut dihadiri beberapa mitra kerja di antaranya Kementerian Perdagangan, PLN, dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Martin mengimbau Kementerian Perdagangan melalui Bappebti mengajak pedagang pengepul atau yang lazim disebut tengkulak memanfaatkan SRG.

“Seperti yang kita ketahui bersama Kementerian Perdagangan melalui Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mengajak pedagang pengepul atau yang lazim disebut tengkulak memanfaatkan SRG untuk membantu petani menstabilkan harga saat panen raya

”

KEHADIRAN SRG INI DIHARAPKAN MAMPU MEMBANTU PARA PETANI MENJAGA KESTABILAN HARGA PRODUK PERTANIAN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung.
Foto: Eko/nvl



tiba,” papar Martin.

Politisi Partai NasDem ini menginginkan Bappebti tetap berupaya meningkatkan peran perdagangan berjangka komoditi dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui percepatan dalam implementasi pelaksanaan SRG.

Sebagai informasi, SRG sendiri merupakan salah satu instrumen penting penggerak sistem perekonomian di wilayah perdesaan. Dalam kunjungan ini, Komisi VI DPR RI mempertanyakan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Perdagangan terkait SRG tersebut, dan langkah apa saja yang telah serta akan dilakukan ke depannya. ■ eko/es



Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto.
Foto: Anne/nvi

Realisasi Investasi 2021 Diharapkan Mampu Tingkatkan Kualitas UMKM

Single Submission (OSS) ini dapat dimanfaatkan pelaku UMKM guna mengembangkan usahanya.

“Jangan sampai kita hanya mengejar target dari realisasi investasi Rp900 triliun, tetapi kualitas dari investasi itu tak membawa

dampak signifikan terhadap UMKM, SDM dan lapangan kerja kita,” terang Adisatrya sembari mengingatkan harus ada kesinambungan atau *link and match* antara SDM dan industri.

Ia menambahkan, adanya ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral termasuk Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (ASEAN Agreement on Electronic Commerce), Indonesia dituntut bisa memanfaatkan peluang bisnis sekaligus dapat memperluas pasar ekspor keluar negeri bukan hanya menjadi tujuan pasar internasional semata.

”

DENGAN MASUKNYA INVESTASI RP900 TRILIUN INI, KITA HARAPKAN PARTISIPASI DAN KUALITAS UMKM MENINGKAT KHUSUSNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KITA

Karena itu, politisi PDI-Perjuangan ini meminta Kementerian Investasi/Kepala BPKM untuk lebih progresif dalam menarik investor luar negeri masuk ke sektor produktif untuk menggerakkan roda ekonomi nasional

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi dalam rangka meningkatkan kemudahan usaha dan investasi. Satgas tersebut diketuai Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahilil Lahadalia.

Secara rinci, realisasi investasi Indonesia dari Januari hingga Juni 2021 mencapai Rp442,7 triliun atau 49,2 persen dari target yang ditetapkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp228,5 triliun (51,6 persen) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp214,2 triliun (48,4 persen).

Untuk mencapai target investasi pada tahun 2021, Kementerian Investasi akan mendorong investasi pada sektor prioritas yang memiliki nilai tambah, seperti industri berorientasi ekspor, energi terbarukan dan infrastruktur.

Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi Indra Darmawan mengatakan berbagai kegiatan promosi dilakukan untuk menarik investasi dari luar negeri. Adapun realisasi investasi sepanjang Januari hingga Juni 2021 provinsi Jawa Tengah berdasarkan negara dengan investasi terbesar yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura dan Taiwan. ■ ann/es

Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto berharap agar realisasi investasi tahun 2021 yang ditargetkan mencapai Rp900 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, khususnya peningkatan kualitas bagi seluruh UMKM nasional.

“Dengan masuknya investasi Rp900 triliun ini, kita harapkan partisipasi dan kualitas UMKM meningkat khususnya dalam pembangunan ekonomi kita,” ujar Adisatrya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/10). Kunjungan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), PT Telkom Indonesia (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero).

Lebih lanjut, ia mengatakan perkembangan investasi harus mampu meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Apalagi, menurut dia, sistem *Online*

Legislator Sarankan Pertamina Pro Aktif Sosialisasikan Program Pertashop

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menyarankan kepada jajaran PT Pertamina agar lebih pro aktif dalam mensosialisasikan program Pertashop kepada masyarakat. Menurutnya program ini sangat bermanfaat, yakni agar kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak (BBM) merata sampai ke pelosok desa.

“Jadi Pertashop ini memang suatu program yang patut kita apresiasi dan dukung. Tujuannya adalah agar kebutuhan akan BBM ini tersalurkan merata ke seluruh Indonesia. Selama ini problem kita memang pada tahap distribusi,” kata Karding saat mengikuti FGD Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI dengan Direktur PT Pertamina beserta jajaran, di Bali, Jumat (8/10).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpandangan, program Pertashop ini bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya pondok pesantren bisa bermitra untuk menjual produk Pertashop. Tapi dengan catatan, Pertamina nantinya akan melakukan pendampingan dari sisi manajemen dan akses permodalan ke Bank-Bank Himbara kepada masyarakat.

“Saya berharap Pertamina juga pro aktif mensosialisasikan program (Pertashop) ini ke pondok pesantren, koperasi dan BUMDes. Sehingga distribusinya dapat terlayani dengan baik dan kebutuhan energi yang ramah lingkungan kita dapat, tapi juga bisa memberdayakan ekonomi masyarakat

sekitar,” pungkas Karding.

Legislator dapil Jawa Tengah VI ini juga mengapresiasi, *raw material* pada pembuatan alat-alat yang dibutuhkan Pertashop hampir 100 persen produksi dalam negeri. “Tentu kita harus dorong semampu kita terhadap produksinya,



Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding. Foto: Jaka/nvl

kita tidak boleh terus menerus impor, ada masa dan batasnya. Sehingga kita harus terus memacu anak-anak bangsa kita untuk melakukan produksi dalam negeri, pasti nilai ekonomisnya juga besar,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertashop yang target utamanya ke desa-desa ini sebenarnya juga bagian dari transformasi dari BBM yang subsidi ke arah BBM yang lebih ramah lingkungan. Karena jika dimulai dari perkotaan, banyak sekali isunya.

“Jadi kita mulai dulu dari pedesaan, kita kasih BBM dengan RON yang bagus sesuai aturan KLHK tahun 2017 yang dijual itu minimal RON 91. Selain itu, kita juga telah bekerjasama dengan Bank Himbara, salah satunya dengan BRI dan DP-nya itu nol persen. Nanti akan dilakukan survei bersama perbankan, yang penting bisa dilewati mobil truk kecil,” terang Nicke.

Nicke menambahkan, Pertashop ini harus didukung semua pihak, karena akan mendapatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Dalam rancangan kita, ketika akan membangun Pertashop di seluruh Indonesia maka pabrikatornya juga akan ada di seluruh Indonesia, jadi tidak hanya terpusat di Jawa. Misalnya ingin membangun Pertashop di Makassar, nanti akan ada pabrikasinya di wilayah Sulawesi. Kita juga sudah kontrak

payung dengan PT Krakatau Steel untuk bahan bakunya, sehingga harganya bisa lebih murah,” jelas Nicke dalam paparannya kepada Komisi VII DPR RI.

Nicke berharap, dengan tersebarnya pabrikasi di semua wilayah Indonesia, dapat meningkatkan industri lokal, peningkatan ekonomi daerah dan pelayanan terhadap masyarakat juga akan semakin mudah. “Saya kira (Pertashop) ini bisnis yang paling aman ya di saat pandemi seperti ini, karena sudah ada kepastian konsumennya,” tutup Nicke. ■jk/sf

Aktivitas Positif Desa Wedomartani Perlu Keberlangsungan

Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri mengatakan, Desa Wedomartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bisa menjadi *pilot project* bagi desa-desa seluruh Indonesia dalam menekan angka kejahatan, pelecehan terhadap perempuan dan juga kekerasan anak. Kegiatan untuk karang taruna di desa ini cukup aktif, mereka juga membuat program desa ramah anak dan perempuan serta membentuk badan penanggulangan bencana tingkat desa.

Saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Sleman, DIY,

Sabtu (9/10), I Komang Koheri berharap agar kegiatan positif yang ada di desa Desa Wedomartani tersebut harus terus dijalankan dan dikembangkan lagi sesuai dengan potensi yang dimiliki.

“Harus ada keberlangsungan dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini akan terus dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Masyarakat mempunyai kegiatan yang positif, terutama untuk anak-anak muda yang ada di desa bisa mengembangkan kreativitas mereka,” ucap legislator dapil Lampung II itu.

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini mengatakan, anggaran yang dikeluarkan untuk mewujudkan desa

mandiri ini bersumber dari swadaya masyarakat dan juga bantuan dari Pemerintahan Kabupaten Sleman. Maka dari itu, ia berharap kegiatan ini terus di jalankan untuk menekan angka kegiatan yang negatif.

“Untuk mewujudkannya, mereka menggunakan biaya dari kemandirian masyarakat dan juga bantuan dari Pemerintahan Kabupaten Sleman. Maka dari itu sangat sayang sekali jika kegiatan ini tidak dikembangkan lagi. Saya lihat potensi kreatifitas masyarakat desa nya tinggi. Harus terus ada wadah yang bisa menaungi kreativitas masyarakatnya,” pungkasnya. ■ azk/es



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan dari program ATENSI di Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto: Azka/nvl

DPR Dorong BLKPP Palu Bersinergi Dengan Industri Pertambangan



Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi bersama Komisi IX DPR RI saat meninjau BLKPP Palu. Foto: Oji/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas (BLKPP) Palu melakukan sinergitas kerja sama dengan perusahaan industri pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk membentuk program pelatihan kerja.

“Tolonglah dekati perusahaan-perusahaan tambang itu, lakukan sinergitas kerja sama dengan membentuk program-program pelatihan kerja. Saya yakin banyak potensi sumber daya manusia berkualitas apabila benar-benar dicetak dengan skema yang baik di Sulteng,” ujar Nurhadi usai melakukan tinjauan ke BLKPP Palu bersama Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI ke Sulteng, Jumat (8/10).

Politisi Partai NasDem ini juga menekankan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulteng agar jangan

hanya menggantungkan pembiayaan program-program utamanya pelatihan kerja bersumber pada APBD atau APBN. Ada 16 paket program pelatihan yang bersumber dari APBD dan 16 paket program pelatihan dari APBN itu masih kecil sekali dibandingkan jumlah angkatan kerja di Sulteng yang membutuhkan pelatihan kerja.

“Buat terobosan baru merangkul industri pertambangan mengadakan pelatihan dengan dana CSR (Corporate Social Responsibilities). Pelatihan kerja saat ini seperti perbengkelan, salon, komputer misalnya, memang betul bisa membuat mereka mandiri, tapi ini butuh modal jika mereka ingin buka bengkel misalnya,” tandasnya.

Legislator dapil Jawa Timur VI ini mendukung masukan Gubernur Sulteng agar pelatihan kerja juga difokuskan pada *skill* (keterampilan) industri pertambangan yang banyak

dibutuhkan di Sulteng. Pelatihan kerja yang ada sekarang ini menurutnya harus di *update* terkait peralatan, sarana dan prasarana, disesuaikan dengan kearifan lokal. Ia menegaskan, jangan sampai industri pertambangan di Sulteng justru mendatangkan pekerja tambang dari daerah lain.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng Arnold Firdaus mengatakan, dengan kedatangan Komisi IX DPR RI dapat melihat langsung kondisi bangunan BLKPP yang cukup parah kerusakannya imbas bencana gempa pada tahun 2018 silam.

“Selain kerusakan infrastruktur bangunan, BLK Palu juga membutuhkan peremajaan peralatan yang digunakan pelatihan praktik kerja. Kami butuh dukungan politik anggaran dari Komisi IX DPR agar program pelatihan di BLK Palu bisa berjalan,” pungkasnya. ■ oji/sf



BUAT TEROBOSAN BARU MERANGKUL INDUSTRI PERTAMBANGAN MENGADAKAN PELATIHAN DENGAN DANA CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES). PELATIHAN KERJA SAAT INI SEPerti PERBENGKELAN, SALON, KOMPUTER

Sakinah Aljufri: Harus Ada Keadilan Anggaran bagi Provinsi Sulteng

Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri menyampaikan bahwa sudah lama dirinya ingin agar Komisi X DPR RI dapat berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tengah supaya dapat mendengar secara langsung apa yang menjadi keluh kesah masyarakat Sulteng. Ia mengungkapkan, selama ini transfer anggaran yang turun ke Sulteng sangat kecil sekali.

"Terkait masalah pariwisata dan ekraf, saya selalu menyuarakan kepada pemerintah pusat agar ada keadilan anggaran. Kita sudah mengalami bencana yang begitu dahsyat yang memporakporandakan baik itu objek wisata, olahraga, dan juga pendidikan. Dengan transfer anggaran Sulawesi Tengah yang sangat kecil, harapannya ke mana lagi kalau bukan kepada APBN," kata Sakinah saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Kota Palu, Sulteng, Senin (11/10).

Sakinah menegaskan Sulteng juga merupakan bagian dari NKRI, sehingga fokus perhatian pemerintah jangan hanya terpusat di Pulau Jawa saja. "Saya tidak merasa cemburu dengan adanya super prioritas dan lain sebagainya, tetapi harus ada keadilan anggaran. Sehingga seperti keinginan kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang setiap saat kita gaung-gaungkan dan ucapkan itu bisa terwujud dan terimplementasi sehingga masyarakat tidak merasa dirinya dianaktirikan," tegasnya.

Menurutnya, sektor yang paling urgen bagi Sulteng saat ini adalah menyangkut bidang pendidikan.

Banyak sekolah pasca bencana yang masih rusak dan perlu perhatian.

"Sementara di sektor pariwisata kita akan menaikkan ekonomi kreatif kita, dan kita mempunyai tempat pariwisata yang bagus, jadi jangan mempersulit soal (anggaran) itu. Saya ada di Komisi X sebagai perwakilan masyarakat Sulteng, jadi hargai perwakilan itu yang dikirim oleh rakyatnya untuk bersuara memperjuangkan daerahnya," tandas Sakinah.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu menyampaikan, struktur lain yang

juga dibutuhkan oleh masyarakat Bumi Tadulako itu adalah sarana dan prasarana di bidang olahraga.

"Kita butuh anak yang sehat, kuat, dan punya kreativitas, sehingga perlu diperhatikan sisi olahraganya agar generasi muda tidak lari kepada hal-hal yang negatif, seperti serangan narkoba dan sebagainya. Oleh karenanya mereka butuh fasilitas olahraga. Sementara stadion olahraga yang ada telah hancur dan hal ini butuh dukungan Komisi X DPR dan Kemempora untuk mewujudkannya," tutup Sakinah. ■ dep/es



Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri bertukar cenderamata dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Foto: Dep/mvl

Apresiasi Upaya Perpustakaan DPR, Puteri Komarudin Dukung Melek Literasi Digital



Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam seminar bertema 'Mewujudkan Parlemen Modern Melalui Literasi Digital' yang digelar oleh Perpustakaan DPR RI di Gedung Nusantara. Foto: Mentari/nvl

Mendukung terwujudnya Parlemen Modern, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi upaya Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang mencanangkan 11 layanan digital perpustakaan. Selain memudahkan akses informasi, menurutnya pencanangan layanan tersebut turut bertujuan mengedukasi literasi digital baik di lingkungan DPR RI, Setjen DPR RI, maupun publik luas pada masa pandemi Covid-19.

"Saya mengapresiasi usaha Perpustakaan DPR RI untuk ikut mewujudkan parlemen yang modern. Layanan memiliki potensi untuk menjadi sources yang berkontribusi pada peningkatan literasi digital," ucap Puteri dalam seminar bertema 'Mewujudkan Parlemen Modern Melalui Literasi Digital' di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10).

Turut hadir Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam acara itu. Puteri memahami, akibat pandemi, kehadiran ruang digital menciptakan dua

sisi mata uang yang cukup dilematis. Pertama, ruang digital selalu mengalami perubahan yang cepat seiring meningkatnya kuantitas masyarakat Indonesia yang memanfaatkan ruang tersebut. Di sisi lain, belum maksimalnya kurasi terhadap informasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kebenaran dari isu yang menjadi perhatian masyarakat.

Menjembatani kesenjangan yang dilematis itu, Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu menegaskan peningkatan literasi digital ini perlu digalakan sebagai jawaban permasalahan atas minimnya ketersediaan akses digital dan kurangnya kemampuan publik

dalam memanfaatkan ruang digital. "Literasi digital itu juga sebenarnya menjadi tugas kita bersama. Dari Anggota DPR akan terus melakukan edukasi terkait dengan literasi digital ini, jadi masyarakat kita sudah bisa memilah-milah mana informasi yang bisa dipercaya," terangnya.

Menyadari Perpustakaan DPR RI berpotensi menjadi penyedia sekaligus kurator informasi DPR RI yang lebih baik, Dirinya mendukung diterapkannya nilai literasi digital dalam setiap pengembangan layanan digital Perpustakaan DPR RI. Ia berharap setiap layanan itu berkontribusi mewujudkan transparansi informasi, membangun kepercayaan publik, sekaligus membangun representasi yang lebih baik.

Sebelumnya Plt. Karo Humas dan Protokol Kharisun Alaikum menjelaskan Perpustakaan DPR RI menyediakan 11 layanan perpustakaan digital untuk menunjang kinerja DPR RI maupun Setjen DPR RI. Di antaranya Indonesia One Search, Katalog Perpustakaan, Repositori DPR, DPR E-Library, E-Resources, E-Kliping Perpustakaan, E-Paper Perpustakaan, Badan Keahlian, Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPINTER), Informasi Hukum Terkualifikasi (ECLIS), dan Informasi Literasi (INLIT). ■ ts/sf



Sekjen DPR Apresiasi Predikat Badan Publik Informatif dari KIP Sebagai Wujud Parlemen Modern

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi capaian predikat Badan Publik Informatif oleh DPR RI dengan nilai 96,52, dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP). Anugerah ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring

dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Tentu kita bersyukur hari ini pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, DPR mendapatkan kategori Badan Publik Informatif yang

disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Presiden RI. Saya kira ini adalah upaya kerja keras dari semua jajaran Setjen DPR RI untuk mewujudkan konsep dari Pimpinan DPR tentang Parlemen Modern,” jelas Indra pasca menghadiri acara Anugerah KIP 2021 yang diselenggarakan secara daring dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10).

Karena merupakan wujud dari Parlemen Modern, Indra menegaskan capaian ini akan dipertahankan dan dievaluasi secara terus-menerus agar bagaimana publik dapat dengan mudah mengakses informasi yang ada di DPR RI. Akses publik ini, jelas Indra, tidak hanya bersifat manual namun juga digital. “Misal *website* DPR saat ini belum semua lini mudah terakses, sehingga itu merupakan satu catatan ke depan ini akan kami perbaiki adalah penguatan di *website* kita,” tambah Indra.

Indra menegaskan predikat Badan Publik Informatif ini akan menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Keterbukaan Informasi Publik oleh seluruh *stakeholder* informasi publik di DPR RI dan Setjen DPR RI. Menurutnya sinergi yang baik antar unit kerja menjadi penting dalam memenuhi semua unsur-unsur keterbukaan.

“Selain itu adanya proyek *big data* tahun depan mempermudah semua sistem yang ada di DPR, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses data yang ada di DPR, bahkan, misalnya dapat melihat keputusan-keputusan seperti rapat komisi. Dan itu adalah salah satu kriteria yang akan kita perbaiki,” jelas Indra lebih lanjut.

Diketahui, dari hasil monev tahun 2021 ini terhadap 337 badan publik yang dinilai oleh KIP dengan klasifikasi sebagai berikut: Informatif sejumlah 83 badan publik; Menuju Informatif sejumlah 63 badan publik; Cukup Informatif sejumlah 54 badan publik; Kurang Informatif sejumlah 37 badan publik; dan Tidak Informatif sejumlah 100 badan publik. ■ rdn/sf



Foto bersama Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan jajaran Biro Humas dan Protokol. Foto: Gerald/nvl

Bimtek Aplikasi E-Sign dan SNIPER Implementasi Parlemen Modern



Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti. Foto: Jaka/nvl

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti menyampaikan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi E-Sign dan SNIPER yang diselenggarakan untuk jajaran pejabat dan staf di lingkungan Deputi Bidang Persidangan terdiri dari enam biro merupakan implementasi yang sesuai dengan visi DPR RI menjadi Parlemen Modern dan profesional.

Terlebih, mengingat ke depannya yang paling merasakan manfaat dari

”

HADIRNYA KEDUA APLIKASI E-SIGN DAN SNIPER TERSEBUT SEMAKIN MEMPORTEGAS VISI PARLEMEN MODERN YANG TERBUKA SERTA SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM BEKERJA

kedua aplikasi tersebut adalah segenap jajaran di Deputi Bidang Persidangan. “Karena, di Deputi ini banyak terdapat produk-produk dokumen persuratan disamping administrasi keuangan,” ujar Maya, sapaan akrabnya usai membuka Bimtek Aplikasi E-Sign dan SNIPER DPR RI, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/10).

Seperti contohnya, sambung Maya, ia sering menekan penandatanganan surat kunjungan kerja hingga mencapai 2 rim. Begitu juga, jajaran kepala biro yang harus menandatangani surat dapat semakin dimudahkan oleh hadirnya kedua aplikasi E-Sign dan SNIPER ini. Tak hanya itu, melalui kedua aplikasi tersebut, nantinya dapat *tracking* sejauh mana dokumen-dokumen yang ada.

Termasuk, tutur Maya, di tengah masih adanya situasi pandemi saat ini, maka bagi jajaran pejabat, staf, kepala bagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau Komisi yang *Work From Home* (WFH) maupun bertugas mendampingi kunjungan kerja Anggota DPR RI bisa melaksanakan tugas secara *real time* dimanapun dan kapanpun melalui kedua aplikasi tersebut.

“Jadi, dimanapun dan kapanpun segenap pejabat, khususnya di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dapat melaksanakan tugas. Hadirnya kedua aplikasi E-Sign dan SNIPER tersebut semakin mempertegas visi Parlemen Modern yang terbuka serta semakin efektif dan efisien dalam bekerja dan semakin bisa menyajikan data secara digital dengan sebaik-baiknya dan akuntabel,” pungkash Maya.

Turut hadir dalam sosialisasi ini sejumlah pejabat di lingkungan Setjen DPR RI, di antaranya Kepala Pusat Teknologi Informasi sekaligus Plt. Deputi Administrasi Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko, Plt. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Djoko Hanggoro, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Irfan, serta segenap pejabat eselon dan staf peserta Bimbingan Teknis Aplikasi E-Sign dan SNIPER Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI. ■ pun/sf

Pedoman RIA Permudah Penyusunan Naskah Akademik Maupun RUU

Ketua Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menilai kehadiran pedoman *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yang diluncurkan Sekretariat Jenderal DPR RI akan mempermudah penyusunan naskah akademik maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dilakukan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan pelayanan.

“Iya (pedoman RIA) tentu mempermudah dalam arti ada *tools*-nya, ada kerangkanya. Jadi, kan kalau mau membuat makalah, ada metodenya. Jadi kalau ada metodenya kan bisa mempermudah. Jadi dari sisi (penyusunan) itu betul,” ujar Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul usai peluncuran pedoman RIA di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10). Turut hadir Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pejabat di lingkungan Setjen DPR RI.

Sensi menjelaskan, dengan hadirnya pedoman RIA ini, akan menjadi alat yang mampu menggali lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif lain seperti nilai Pancasila, nilai lingkungan hidup, sistem pemerintahan, sisi gender dan lainnya. Dengan semua aspek yang ter-cover dalam RUU maupun naskah akademik, lanjut Sensi, nantinya dapat mengantisipasi hal lain, seperti kelompok terdampak, apa saja dampaknya, dan lainnya.

“(Ketika) Kita membuat naskah RUU, yang ternyata membutuhkan SDM dengan kemampuan khusus,



Ketua Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul (kanan) saat peluncuran pedoman RIA. Foto: Jaka/nvl

itu bisa kita antisipasi. Jadi, mempermudah dalam hal (penyusunan naskah RUU) itu,” imbuh Sensi. Diketahui, dalam pembentukan pedoman ini, selain melibatkan internal BK DPR, juga melibatkan berbagai pakar dari perguruan tinggi dan pakar-pakar dari internasional.

Adapun metode ini sudah digunakan secara internasional seperti negara-negara di Eropa dan Amerika, bahkan di instansi Pemerintah Indonesia. Namun menurut Sensi, yang membedakan yakni spesifikasi dalam metode karena disesuaikan pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, pada pedoman RIA ini pun dibentuk berdasarkan perkembangan terakhir sehingga akan lebih kontekstual

dengan DPR RI.

“Kalau DPR ini (cakupan pembahasan dalam naskah akademik maupun RUU) kan umum sekali. Jadi semua urusan ini harusnya bermuara ke DPR. Jadi, kita *tools*-nya juga harus banyak. Kalau di Kementerian Kelautan, pasti dia sisinya adalah sisi aspek kelautan,” terang Sensi.

Pada akhirnya Sensi berharap pedoman RIA ini dapat membantu proses alat kerja di DPR untuk memiliki standar yang baku, sehingga semua akan bekerja dengan standar yang sama, termasuk universitas yang bekerjasama dengan BK DPR RI. Selain itu, Sensi berharap *output* RUU dapat lebih fokus serta lebih dalam analisisnya, sehingga kualitas UU menjadi lebih baik. ■ hal/sf

Indonesia-Kolombia Perkuat Kerja Sama Pariwisata Pasca-Bebas Visa

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Kolombia Yan Permenas Mandenas menerima Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, Juan Camilo Valencia González, guna membahas beberapa kerja sama yang dapat dibangun dan diperkuat antarkedua negara.

Yan Permenas menjelaskan, salah satu aspek kerja sama yang perlu diperkuat adalah dari sisi pariwisata (*tourism*), baik dari Indonesia ke Kolombia maupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan telah ditandatanganinya persetujuan dan perjanjian bersama untuk kesepakatan Bebas Visa pada Bulan Agustus 2020 silam, antar Menteri Luar Negeri Indonesia-Kolombia.

“Nah kerja sama di bidang *tourism* ini tidak akan berjalan kalau kita tidak bisa memangkas jalur penerbangannya,” ujar Yan Permenas, usai pertemuan dengan Dubes Juan Camilo Valencia González di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/10). Turut hadir dalam pertemuan ini, Anggota DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa (F-PKB) dan Bambang Hermanto (F-Golkar).

Ia menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kunjungan DPR RI sebelumnya ke Kolombia, yang diterima langsung mulai dari presiden, parlemen, Menlu, hingga Menhub Kolombia. Pertemuan ini untuk mendorong agar dipangkasnya akses penerbangan, sehingga hanya cukup sekali transit. “Dari Bogota langsung ke Amsterdam dan Jakarta, atau dari Bogota



Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Kolombia Yan Permenas Mandenas saat pertemuan dengan Dubes Kolombia untuk Indonesia Juan Camilo Valencia González di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Foto: Jaka/hvt

kemudian Doha (Qatar), dan ke Bali,” urai Yan Permenas.

Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan pada Desember 2021 mendatang, akan berlangsung Forum Bisnis Transportasi Udara di Kolombia. Yan berharap perusahaan-perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia, baik yang dikelola oleh BUMN maupun swasta, dapat turut hadir menyampaikan potensi bisnis pariwisata dari kunjungan wisatawan kedua negara.

“Sehingga, bisnis penerbangan kita tidak hanya melakukan investasi di dalam negeri, tapi juga investasi di luar negeri dengan *join* ke perusahaan penerbangan di luar yang saling menguntungkan,” ujar Yan Permenas.

Dengan adanya konektivitas penerbangan internasional pasca berlakunya kebijakan Bebas Visa ini, Yan Permenas berharap perputaran ekonomi bisa lebih meningkat dan

secara global masyarakat Indonesia akan punya pengetahuan secara luas dan dunia secara komprehensif. “Serta potensi-potensi investasi yang bisa dikembangkan melalui kerja sama ini,” harap Anggota Komisi I DPR RI ini.

Dubes Juan Camilo menambahkan, Presiden Kolombia Ivan Duque Marquez sudah berbincang dengan Presiden RI Presiden Joko Widodo untuk menghubungkan jalur penerbangan Bogota-Amsterdam-Jakarta. Jakarta dan Bali, menurutnya, bisa menjadi *hub* penerbangan Kolombia dengan negara di ASEAN.

“Jadi bandara di Kolombia memang yang terbesar di Amerika Latin, dan ini sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi untuk menjadikan Jakarta dan Bali sebagai *hub*. Dan ini *hub*-nya yang harus ditindaklanjuti dengan kementerian terkait,” jelas Dubes Juan saat pertemuan tersebut. ■ rdn/sf

Tinjau Jamkestama di Makassar, BURT Imbau RS *Provider* Tingkatkan Pelayanan

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Achmad Dimiyati Natakusumah mengimbau agar rumah sakit provider PT Jasindo untuk meningkatkan pelayanannya terutama bagi peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) yaitu Anggota DPR beserta keluarganya.

“Kami kembali mengunjungi RS Siloam Makassar. Kami ingin melihat kembali pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh RS Siloam Makassar khususnya terkait dengan pelayanan bagi peserta Jamkestama juga penanganan Covid-19,” ungkap Dimiyati saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan perwakilan manajemen Rumah Sakit (RS) Siloam Makassar dan perwakilan PT Asuransi

Jasindo di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (21/10).

Selain itu, lanjut Dimiyati, Jasindo melalui RS provider-nya, salah satunya RS Siloam harus dapat memastikan pelaksanaan program Jamkestama berjalan optimal. Ia juga meminta agar pelayanan terhadap peserta Jamkestama di RS Siloam ini tersosialisasikan dengan baik.

“Pihak rumah sakit harus mulai menginformasikan kepada Anggota Dewan dapil Sulawesi Selatan ini tentang layanan yang dapat digunakan seperti *medical checkup*. Tadi mereka sampaikan belum banyak yang menggunakan pelayanan ini, padahal (sosialisasi) ini penting mengingat mobilitas Anggota DPR yang tinggi. Kami minta RS Siloam Makassar gencar menginformasikannya,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Dimiyati menjelaskan, saat ini, di dapil Sulawesi Selatan I terdapat 8 Anggota Dewan. Sebagai representatif dari masyarakat Makassar, Anggota DPR RI dalam melaksanakan peran dan fungsinya dihadapkan dengan rutinitas dan kepadatan aktivitas yang cukup tinggi. Selain itu, Makassar merupakan daerah yang sering dikunjungi Anggota DPR RI baik dalam rangka kunjungan kerja maupun kegiatan lainnya, terlebih pada kondisi pandemi Covid-19.

“Dalam pelaksanaannya, BURT mengamati masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan program Jamkestama dengan rumah sakit provider. Oleh sebab itu, BURT melakukan kunjungan langsung pada obyek sebagai bentuk pengawasan,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Banten I tersebut. ■ rmm/es



Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah saat bertukar cinderamata dengan perwakilan manajemen RS Siloam Makassar. Foto: Ria/nvl



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



RACHMAT GOBEL
WAKIL KETUA DPR RI
@DANG KORMBANG



LODEWIJK F. PAULUS
WAKIL KETUA DPR RI
@DANG KORPOLKAM



PUAN MAHARANI
KETUA DPR RI



SUFMI DASCO AHMAD
WAKIL KETUA DPR RI
@DANG KOREKSI



A. MUHAIMIN ISKANDAR
WAKIL KETUA DPR RI
@DANG HOKNESRA

Selamat Hari Sumpah Pemuda

•• 28 Oktober 2021 ••

"Kami putra dan putri Indonesia,
mengaku bertumpah darah yang satu,
Tanah Air Indonesia."
"Kami putra dan putri Indonesia,
mengaku berbangsa yang satu,
Bangsa Indonesia."
"Kami putra dan putri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan,
Bahasa Indonesia"



@ DPR_RI



DPR RI

www.dpr.go.id



@ DPR_RI



DPR RI